

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI II DPR RI KE KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020
SENIN, 30 NOVEMBER 2020**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah adalah dalam rangka serap aspirasi dan melihat secara langsung persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Tim Kunjungan Sepesifik Komisi II DPR RI berjumlah 21 orang, 4 orang staf sekretariat, 2 orang tenaga ahli, dan 2 orang tim media parlemen. Rombongan tim dipimpin oleh Bapak Saan Mustopa (Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-Nasdem).

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1	A-367	Saan Mustopa	Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi II/F-Nasdem
2	A-28	H. Yaqut Cholil Qoumas	Wakil Ketua Komisi II /F-PKB
3	A-199	Ir. Muhamad Prakoso	Anggota/F-PDIP
4	A-186	Paryono, SH., MH	Anggota/F-PDIP
5	A-219	Johan Budi SP	Anggota/F-PDIP
6	A-141	Drs. Djarot S. Hidayat, M.S.	Anggota/F-PDIP
7	A-310	Agung Widiyantoro, SH., M.Si.	Anggota/F-PG
8	A-308	Teti Rohatiningsih, S.Sos.	Anggota/F-PG
9	A-80	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.	Anggota/F-Gerindra
10	A-75	H. Ahmad Muzani	Anggota/F-Gerindra
11	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/F-Gerindra
12	A-376	Aminurokhman, SE., MM.	Anggota/F-Nasdem
13	A-30	H. Sukanto, SH	Anggota/F-PKB
14	A-53	Edward Tannur, SH	Anggota/F-PKB
15	A-22	Luqman Hakim, S.Ag.	Anggota/F-PKB
16	A-541	H. Mohamad Muraz	Anggota/F-Demokrat
17	A-538	H. Agung Budi Santoso	Anggota/F-Demokrat
18	A-422	Dr. H. Mardani, M.Eng	Anggota/F-PKS
19	A-410	H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si	Anggota/F-PKS
20	A-520	John Siffy Mirin	Anggota/F-PAN
21	A-465	Hj. Nurhayati	Anggota/F-PPP
22	----	Dra. Hani Yuliasih, M.Si.	Kabag Set. Komisi II
23	----	Dicky Firmansyah, S.Sos	Sekretariat Komisi II
24	----	M. Hisyam Wildani	Sekretariat Komisi II
25	----	Aniyah	Sekretariat Komisi II
26	----	Wardi	Tenaga Ahli Komisi II
27	----	Hesbul Bahar, M.H	Tenaga Ahli Komisi II
28	----	Muhamad Syamsul Fajri	TV Parlemen
29	----	Jaka Nugraha	Media Sosial

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ini juga didampingi oleh utusan dari Kemendagri RI yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI.

B. Waktu Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Melihat Secara Langsung Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan pada tanggal 30 November – 1 Desember 2020. Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI melakukan kegiatan pengawasan, serap aspirasi dan dialog dengan berbagai pihak, terutama dengan Pemerintah Kota Semarang dan Ketua KPU serta Ketua Bawaslu Kota Semarang. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan dalam bidang pengawasan terkait dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi II DPR RI.

BAB II: HASIL KUNJUNGAN (Pertemuan dengan Pemerintah Kota Semarang, KPU dan Bawaslu Kota Semarang)

A. Sambutan Drs. TAVIP Supriyanto, M.Si. (Pjs. Wali Kota Semarang)

Pjs Walikota Semarang memulai sambutannya dengan mengucapkan salam pembuka, dilanjutkan dengan menyapa seluruh hadirin. Tidak lupa beliau menyampaikan ucapan Selamat Datang kepada Tim Kunjungan dari Komisi II DPR RI.

PJs Walikota menyampaikan beberapa hal penting terkait persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kota Semarang, dan kaitannya dengan situasi Pandemi Covid-19 yang belakangan ini menanjak kembali.

Secara garis besar Pemerintah Kota Semarang dan KPU Kota Semarang siap menyelenggarakan Pilwalkot di tengah pandemi Covid-19. Meski demikian, menurutnya terdapat sejumlah variabel yang perlu mendapat perhatian sehingga warga merasa nyaman dan aman saat menyalurkan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang.

Setiap tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan, Pemkot selalu bersinergi dengan Forkopimda, KPU dan Bawaslu baik tingkat kota maupun provinsi. Tavip Supriyanto, selaku Pjs Wali Kota Semarang, juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi pemilihan beserta penghitungan suara di era pandemi. Simulasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua stakeholder dan panitia penyelenggara pemilu taat terhadap protokol kesehatan dan menghindari adanya kerumunan yang berisiko memunculkan kluster baru penyebaran Covid-19.

Tavip juga menceritakan sejumlah program yang telah dikerjakan demi memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Semarang. Mulai dari tracing ketat terhadap kasus positif dan suspek serta operasi yustisi gabungan untuk menyosialisasikan protokol kesehatan, seperti pemakaian masker, cuci tangan secara rutin dan menjaga jarak.

Pemkot juga mengajak warga untuk turut berperan dalam menggerakkan kampanye protokol kesehatan dan meningkatkan kesadaran untuk memutus penyebaran Covid-19. Misalnya, melalui Program Kampung Siaga Candi Hebat yang baru saja meraih penghargaan Indonesia Healthcare Innovation Award-IV 2020 untuk Gold Award Kategori Germas dengan Inovasi Kampung Siaga Candi Hebat. Selain itu, Pemkot Semarang juga mendapatkan Platinum Award Kategori IT Kesehatan dengan Inovasi Lawan Covid-19 Harus Strong, yang nantinya diharapkan menjadi semangat Kota Semarang dalam melawan pandemik Covid-19.

Tavip Supriyanto juga menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tambahan tempat karantina dan laboratorium baru supaya hasil swab test bisa diketahui dengan cepat. Lalu, untuk menekan kasus baru, kita juga terus melakukan operasi Yustisi, karena kesadaran masyarakat menggunakan prokes sudah menurun. Tidak hanya itu, Pemkot juga tetap berupaya mengedukasi masyarakat, mengingatkan lagi tentang pentingnya prokes, dan bahkan ada tim khusus untuk mengedukasi masyarakat di tempat-tempat kerumunan.

Terkait NPHD untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sudah selesai dan telah ditandatangani bersama. Tidak ada refocusing untuk penanganan Covid dari dana tersebut. Dana penanganan Covid diambilkan dari pos lain. Untuk lebih detail terkait perkembangan Covid-19 di Kota Semarang bisa disampaikan nanti oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sedangkan mengenai permasalahan KTP-el bisa dijelaskan nanti oleh Disdukcapil.

B. Sambutan Bapak Saat Mustopa Ketua Tim Sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Wakil Ketua komisi II DPR RI, yang sekaligus Ketua Tim, Bapak Saan Mustopa, memulai sambutannya dengan salam dan menyapa seluruh hadirin, khususnya kepada Wali Kota Semarang, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta KPU dan Bawaslu Kota Semarang. Kunjungan Kerja Spesifik ini untuk melakukan serap aspirasi secara langsung terkait persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Kota Semarang 2020. Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pjs Walikota Semarang bersama jajarannya atas perkenannya menerima rombongan Kunspek Komisi II DPR RI di Kota Semarang.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI sebagai berikut:

1. Memastikan terkait persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang dalam suasana bencana non alam (pandemi Covid- 19). Karena calon tunggal, dinamika politik Pilkada di kota Semarang mungkin tidak terlalu tinggi di bandingkan di daerah yang lain.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam suasana Pandemi, jaminan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, pemilih, dan peserta harus dipastikan. Karena itu, kami menganggap penting untuk mendengar langsung sejauhmana penerapan protokol kesehatan telah dipersiapkan, bagaimana tingkat ketaatan pasangan calon dan tim sukses dalam penerapan protocol kesehatan, dan sejauh mana pula persiapan yang kesiapan Penyelenggara dalam pemenuhan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada.

Selain penerapan protokol kesehatan, kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus juga dijamin. Meskipun pandemic, kualitas pelaksanaan Pilkada tidak boleh berkurang. Bahkan kita harus bertekad, suasana Pandemi ini harus dijadikan mometuk untuk mewujudkan Pilkada yang lebih baik dari kondisi normal. Prinsip-prinsip demokrasi harus bisa diterapkan dalam setiap tahapan pilkada. Oleh karena itu, penyelenggara harus mampu memastikan seluruh warga yang punya hak pilih tidak kehilangan hak pilihnya dan dipastikan datang ke TPS.

2. Memastikan warga yang punya hak pilih sudah memiliki KTP el. Komisi II sudah memberikan anggaran ke kemendagri untuk pengadaan blanko. Dan Komisi II sudah menyetujui hal tersebut. Kami ingin memastikan, warga yang punya hak pilih di Pilkada Kota Semarang sudah punya KTP el.
3. Memastikan pemilih yang masuk isolasi mandiri dan sedang dirawat tidak kehilangan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2020.
4. Memastikan pencairan NPHD tidak terkendala dan bisa terlaksana sesuai jadwal.

Terkait protokol kesehatan, dari sisi anggaran tidak terlalu bermasalah karena sudah dianggarkan tersendiri dalam APBN, tetapi yang perlu dipastikan adalah tingkat partisipasi pemilih di tengah pandemic. Yang sangat kita harapkan, partisipasi pemilih tidak mengalami penurunan. KPU harus bisa mengantisipasi situasi ini agar 77,5 Persen pemilih bisa tercapai.

Penyelenggara pemilu dan seluruh stakeholder harus bisa membuktikan bahwa Pilkada Serentak 2020 tidak menimbulkan klaster baru Covid-19. Hal-hal teknis yang perlu diperhatikan, salah satunya, adalah pengaturan kedatangan pemilih di TPS agar tidak terjadi kerumunan atau penumpukan.

Pada kesempatan ini, Komisi II DPR RI ingin mendengar secara langsung pemaparan walikota, KPU dan Bawaslu Kota Semarang terkait beberapa hal tersebut. Selanjutnya, setelah presentasi dilanjutkan dengan dialog atau sesi Tanya jawab.

C. Laporan KPU Kota Semarang terkait Persiapan Pilkada di Kota Semarang

1. Terkait NPHD dari APBD dan APBN

NPHD antara Pemerintah Kota Semarang dengan KPU Kota Semarang Nomor : 978/270/2020, Nomor 584/KU.07-SPJ/3374/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan (Adendum) NPHD Nomor : 978/372, Nomor 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebesar Rp. 453.860.000,- pada TA. 2019 dan Rp. 71.500.000.000,- pada TA. 2020

Jumlah Anggaran Tambahan dari KPU RI yang bersumber dari APBN untuk menjalankan tahapan pilkada dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu sesuai Petikan DIPA Revisi ke 3 Tanggal 25 Juni 2020 dengan tambahan sebesar Rp. 6.152.523.000,- dan sesuai Petikan DIPA Revisi ke 6 Tanggal 20 September 2020 sebesar Rp. 32.535.242.000,-.

2. Penambahan Jumlah TPS

Dengan adanya pandemi Covid-19, dan digalakkanya program PSBB serta *social distancing* oleh Pemerintah RI, maka RDP antara KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Komisi II DPR RI pada 3 Juni 2020 disepakati pembatasan jumlah pemilih sejumlah 500 orang di tiap TPS, turun 300 orang dari jumlah awal 800 pemilih tiap TPS.

Menurunnya jumlah maksimal pemilih per TPS maka hal itu berdampak kepada penambahan jumlah TPS.

KPU Kota Semarang telah menganggarkan 3000 TPS, dengan adanya pandemi Covid-19.

3. Jenis Daftar Pemilih

DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yaitu adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

DPS (Daftar Pemilih Sementara) adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.

DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.

DPPH (Daftar Pemilih Pindahan) adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

4. Daftar Pemilih Tetap

DPT diumumkan mulai tgl 28 Oktober s/d 6 Desember 2020.

PPS mendapatkan 3 rangkai DPT Pilwakot Semarang 2020 untuk digunakan sebagai:

- Pengumuman di balai kelurahan
- Pengumuman di sekretariat / balai RT/RW atau tempat strategis di rencana lokasi TPS.
- Arsip PPS

Jumlah DPT

<u>Jumlah Pemilih di DPT</u>	<u>Laki -laki</u>	: 569.266
	<u>Perempuan</u>	: 604.802
	<u>Total</u>	: <u>1.174.068</u>
<u>Jumlah Pemilih Baru</u>	<u>Laki -laki</u>	: 13.609
	<u>Perempuan</u>	: 14.038
	<u>Total</u>	: <u>27.647</u>
<u>Jumlah Pemilih TMS</u>	<u>Laki -laki</u>	: 59.584
	<u>Perempuan</u>	: 62.986
	<u>Total</u>	: <u>122.570</u>

D. Laporan Bawaslu Kota Semarang terkait Persiapan Pilkada di Kota Semarang

NPHD Bawaslu Kota Semarang

1. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu Kota Semarang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp. 13.349.002.000
2. Tidak ada kendala dalam proses pencairan NPHD
3. Terjadi realokasi anggaran dan telah dibahas dalam TAPD sebanyak 2x

4. Sebesar Rp. 1.282.800.000 adalah anggaran tambahan dari APBN untuk APD Bawaslu Kota Semarang sampai Pengawas TPS

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

1. Bawaslu Kota Semarang memberikan saran perbaikan yang dilakukan ditingkat Kecamatan untuk ganda DPS internal Kecamatan dengan total 715 Pemilih, Pemilih memenuhi syarat belum masuk DPS sebanyak 561 Pemilih; Pemilih tidak memenuhi syarat masuk di DPS sebanyak 1.364 Pemilih;
2. Untuk Saran Perbaikan DPS di tingkat Kota dilakukan dengan memberikan Saran Perbaikan terkait Data Ganda Antar Kecamatan dengan Jumlah 1.181 Pemilih ganda, Invalid Umur 47 Pemilih umur 0-16 Tahun dan Invalid umur lebih dari 95 Tahun sebanyak 248 Pemilih.

Langkah Bawaslu untuk Validitas DPT

1. Langkah dan Upaya Bawaslu kota Semarang agar DPT yang disusun oleh KPU benar-benar valid adalah dengan melakukan pengawasan pencermatan DPT. Bawaslu kota Semarang bersama dengan Panwaslu Kecamatan melakukan identifikasi dengan melakukan pemeliharaan Daftar Pemilih. Hasil pencermatan DPT pertanggal 23 November 2020 ditemukan sebanyak 745 Pemilih TMS yang masuk dalam DPT dan Pemilih Memenuhi Syarat belum masuk DPT sebanyak 52 Pemilih.
2. Bawaslu Kota Semarang telah menginstruksikan Kepada Jajaran Panwaslu Kecamatan untuk memberikan saran Perbaikan Kepada PPK Kecamatan terkait hasil pengawasan yang telah dilakukan;
3. Tahapan Pemeliharaan DPT untuk memastikan KPU benar-benar valid dalam Menyusun DPT Pilkada 2020 akan terus berlanjut hingga tanggal 6 Desember sesuai dengan hasil koordinasi KPU Kota Semarang dengan Bawaslu Kota Semarang.

Pengawasan PKPU Nomor 13/2020

Bawaslu Kota Semarang akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak terkait baik dari GugusTugas Covid-19, Dinas Kesehatan Kota Semarang, KPU Kota Semarang, dan Polrestabes Kota Semarang terkait hal tersebut sebelum acara kampanye serta memberikan **imbau** kepada pelaksanaan pertemuan tersebut.

Bawaslu Kota Semarang akan memberikan saran ataupun imbauan kepada panetia pelaksana kegiatan tersebut untuk berkoordinasi kepada GugusTugas Covid-19 Kota Semarang.

Mengantisipasi Penggunaan Suket Dalam Pilkada

Bawaslu Kota Semarang akan berkoordinasi dengan KPU Kota Semarang dan Dispendukcapil Kota Semarang terkait perkembangan Perakaman KTP terkhusus yang belum rekam, sehingga pada saat proses pencoblosan pemilih suket dapat memberikan suaranya sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.

Pengawasan pada Saat Pemungutan Suara

Penerapan Pengawasan pada hari H pemungutan suara ditiap TPS akan dilakukan secara langsung oleh Pengawas TPS (PTPS) dengan membekali PTPS dengan Buku Saku Pengawas TPS sesuai standar Protokol Kesehatan Covid-19.

Pengawasan Sirekap Pada Pilkada 2020

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya dapat diakses oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terdaftar di KPU RI, sehingga Bawaslu Kota Semarang beserta jajarannya tidak dapat mengakses sistem tersebut. Bawaslu Kota Semarang dan jajarannya baik Panwaslucam, Panwasluketel, dan PTPS akan mengandalkan pengawasan secara langsung dan melekat di masing-masing TPS agar proses rekapitulasi suara berjalan sesuai prosedur dan berkualitas

Pengawasan ASN

1. Bawaslu Kota Semarang melakukan Pengawasan melekat terhadap ASN pada Pilkada 2020 baik secara langsung ataupun melalui media sosial dalam selain itu Bawaslu Kota Semarang telah melakukan tugas dan kewenangan terhadap ASN yang melanggar, dalam hal ini Ada 14 ASN di Kota Semarang yang melanggar netralitas ASN dan telah diteruskan pada KASN. Telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah kota dan Kementerian Agama Kota Semarang sebanyak 12 ASN, masih ada 2 ASN yang masih dalam proses menunggu tindaklanjut dari KASN RI.
2. Ada 6 register kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN; 1 register kasus tidak diteruskan kepada KASN karena status terlapor tidak terbukti sebagai ASN (status Non ASN), jadi total kasus yang diteruskan pada KASN ada 5 register kasus di dalamnya terdapat 14 ASN di Kota Semarang

Distribusi Logistik

1. Logistik khusus untuk penyelenggaraan Pilkada dimasa pandemi *Covid-19* telah diterima dengan baik oleh Bawaslu Kota Semarang
2. Semua logistik yang didistribusikan ke Bawaslu Kota Semarang diterima dengan baik tanpa adanya kerusakan barang.

Potensi Kerawanan

1. Bawaslu Kota Semarang melakukan pemetaan terhadap kerawanan di Kota Semarang yang dituangkan dalam Form Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
2. Identifikasi terhadap kerawanan yang terjadi pada tahapan pilkada 2020 dan menuangkannya ke dalam form IKP, dilanjutkan pada rapat koordinasi dengan jajaran terkait.
3. Melalui Kelompok Kerja (Pokja) Gakkumdu Koordinasi selalu terjalin dengan baik yang melibatkan 25 orang yang terdiri dari Bawaslu Kota Semarang, Polresta Semarang dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Meminimalisir tingkat kelelahan pada penyelenggara khususnya di tingkat TPS dengan memperpanjang Timeline/dateline kinerja.
2. Ditingkatkan keamanan pada tingkat TPS untukantisipasi dalam gangguan terhadap surat suara

E. Sesi Tanya Jawab

Johan Budi

1. Untuk KPU saya apresiasi dengan model sosialisasi Pilkada dengan video yang menarik, melibatkan generasi milenial seperti yang dibuat oleh KPU Kota Semarang adalah bagus dan bisa ditiru oleh KPU yang lain.

2. Untuk Dinas Kesehatan, bagaimana bisa mengukur bahwa penularan Covid itu tergantung pada seberapa patuh masyarakat melaksanakan prokes, misalnya yang jaga jarak. Ada prokes tapi penularan tinggi karena mobilitas tinggi. Berapa sampel yang diambil? Mengapa minggu ini tinggi, karena alasan apa? Karena libur panjang atau bagaimana?

Agung Widiyantoro

1. Sy juga mengapresiasi KPU kota Semarang dengan pendekatan milenial. Tapi jangan hanya bisa belanja video tapi tidak bisa disosialisasikan. Selama ini melalui apa saja sosialisasinya?
2. Mendagri bagus juga jika membuat Pilkada Award Covid. Jika ada demikian, kota Semarang bisa menang. Tapi ini perlu dibuktikan pada tanggal 9 Desember 2020, hari pemungutan suara. Apakah betul Covid bisa dikendalikan dan partisipasi pemilih tetap tinggi?
3. Bawaslu perlu buka mata dan buka telinga, calon tunggal bukan berarti tidak ada pelanggaran. Misalnya soal netralitas ASN dan money politik?
4. Kapolresta juga harus tegas jika ada pelanggaran. Dan jika terjadi pelanggaran sampaikan saja dengan terus terang, tanpa harus ada rasa takut.

Aminurokhman:

1. KPU perlu memperhatikan titik TPS karena musim hujan, jangan sampai berada di lokasi yang gampang banjir atau tidak aman dari hujan, syukur kalau ada tempat yang permanen. Perlu dicari yang aman dari kemungkinan yang terburuk.
2. Meskipun di Kota Semarang adalah calon tunggal namun proses demokrasi harus tetap berkualitas. Kita terus jaga agar partisipasi tetap tinggi sesuai target KPU RI.
3. Untuk pencegahan Covid 19 adalah penting. Terkendalinya covid adalah syarat mutlak bagi pelaksanaan pilkada.

Sukanto

Saya sampaikan apresiasi kepada apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Semarang, KPU dan Bawaslu Kota Semarang. Menyimak paparan tadi saya kira pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Semarang aman dan akan berjalan lancar. Saya hanya memberikan penekanan pada pencegahan terjadinya kerumunan yang bisa berpotensi penularan Covid-19.

Edward Tannur

1. KPU menargetkan 77,5% partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020. Apa mungkin di kota Semarang bisa lebih tinggi lagi? Perlu kita upayakan meskipun hanya tinggal berapa hari. Ini untuk membuktikan bahwa Pilkada ini berkualitas. Dunia luar sangat menyoroti Indonesia dengan sistem multipartai. Semoga bisa berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya.
2. Jumlah DPT perlu sinkronisasi. Kuncinya di KTP, kalau ini bisa dilakukan dengan valid dan prosesnya dipermudah bagi yang belum punya amaka akan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Di NTT misalnya, warga sulit mendapat KTP, prakteknya begitu. Apalagi incumbent maju bisa sulit jika tidak mendukung.

Tanggapan/jawaban

Bapak Hakam (Dinas Kesehatan Kota Semarang)

Terkait perkembangan Covid 19, masyarakat bisa akses situs yang sudah disediakan oleh Pemkot. Di sana sudah dijelaskan secara detail. Mulai dari ketersediaan kamar, bantuan dan distribusikanya juga sudah dijelaskan secara jelas.

Metode kami adalah pengamatan langsung ke RT RW, setiap 2 minggu kami muter untuk update data. Sampelnya, 10 persen dari seluruh penduduk. Proses ini obat sebelum vaksin ada. Proses 3 M ini yang kita nilai di lapangan. Puskesmas langsung melakukan pengamatan dan datanya diinput langsung ke dalam form data yg telah disiapkan.

Ketua KPU Kota Semarang

Video yang kami buat disosialisasikan melalui media sosial di Kota Semarang, Penayangan di Videotron Kota Ssemariang, dan dijaringan KPUD di kecamatan dan kelurahan serta TPS.

Untuk mengantisipasi cuaca yang kurang baik, kami berkoordinasi terus hingga ke kacamatan, termasuk mengenai gudang logistik. Memastikan keadaannya tidak terjadi banjir dan kebocoran yang bisa merusak kota suara.

Mendekat hari H terus kami siapkan sarana prasarana Pilkada agar lancar, termasuk persiapan dan kesipan APD, pembatasan orang yang hadir.

Kita akan menjadi saksi sejarah, mempertahankan kualitas demokrasi di tengah pandemic, termasuk kepada dunia.

BAB III: KESIMPULAN

Dari pemaparan dan dialog (tanya jawab) dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Komisi II DPR RI menyampaikan beberapa catatan penting, di antaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemaparan dari Pemerintah Kota Semarang, KPU dan Bawaslu Kota Semarang, kami berkesimpulan bahwa Kota Semarang sudah siap untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020.
2. Komisi II DPR RI berharap agar Pilkada 2020 berjalan lancar dan sukses, minimal dengan 2 indikator: a/ Covid-19 terkendali, dan Pilkada tidak menimbulkan kluster baru; b/ Partisipasi pemilih dalam Pilkada tetap tinggi, dan target KPU RI bisa dicapai.

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 30 November – 1 Desember 2020. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Desember 2020
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
KOMISI II DPR RI

Lampiran: Dokumentasi Kegiatan

Pertemuan dengan Pemerintah Kota Semarang, KPU dan Bawaslu Kota Semarang

